

Volume 9 Nomor 1 April 2024

E-ISSN 2541-0938 P-ISSN 2657-1528

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI  
**JURKAMI**

**JURKAMI**

**VOLUME 9  
NOMOR 1**

**SINTANG  
APRIL  
2024**

**DOI  
10.31932**

**E-ISSN  
2541-0938  
P-ISSN  
2657-1528**



**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN  
KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Yopinus Bobi<sup>✉</sup>, Dessy Triana Relita<sup>2</sup>, Yulia Suriyanti<sup>3</sup>, Yunita Astikawati<sup>4</sup>  
Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia<sup>1234</sup>

<sup>✉</sup>Corresponding Author Email: yopinusbobi@gmail.com

Author Email: dssytriana.relita@gmail.com<sup>2</sup>, suryantiyuli@yahoo.co.id<sup>3</sup>, yunitaakun@gmail.com<sup>4</sup>

*Article History:*

Received: March 2024

Revision: March 2024

Accepted: March 2024

Published: April 2024

*Keywords:*

Corporate Social

Responsibility;

Good Corporate

Governance

**Abstract:**

*Companies prioritize CSR out of awareness of social and environmental impacts, as well as to meet societal expectations, reduce reputational risks, and strengthen relationships with stakeholders. However, decisions related to CSR can be influenced by public share ownership, because public shareholders have different preferences from institutional or majority shareholders. This research aims to determine the influence of GCG practices and public share ownership on CSR disclosure. The research method used is quantitative using a survey approach. Data collection was carried out through purposive sampling, from 82 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021 and 2022, 76 companies were sampled. Multiple linear regression tests and simple linear regression tests are used as data analysis methods. Linear regression analysis shows that there is a positive and significant influence of audit committee size and ownership on all types of CSR, while the composition of public ownership has a significant negative influence. The composition of the independent board of commissioners and institutional ownership do not have a significant effect. These results indicate the need to consider GCG structure and share ownership in an effort to increase Corporate Social Responsibility disclosure.*

*Sejarah Artikel*

Diterima: Maret 2024

Direvisi: Maret 2024

Disetujui: Maret 2024

Diterbitkan: April 2024

*Kata kunci:*

Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan;

Tata Kelola Perusahaan

yang Baik

**Abstrak:**

Perusahaan memprioritaskan CSR karena kesadaran terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta untuk memenuhi harapan masyarakat, mengurangi risiko reputasi, dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Namun, keputusan terkait CSR bisa dipengaruhi oleh kepemilikan saham publik, karena pemegang saham publik memiliki preferensi yang berbeda dengan pemegang saham institusional atau mayoritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik GCG dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei. Pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling, dari 82 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 dan 2022, diperoleh 76 perusahaan yang dijadikan sampel. Uji regresi linier berganda dan uji regresi linier sederhana digunakan sebagai metode analisis data. Analisis regresi linier menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan ukuran komite audit dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR, sedangkan komposisi kepemilikan publik mempunyai pengaruh negatif yang signifikan. Komposisi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Hasil tersebut menunjukkan perlunya mempertimbangkan struktur GCG dan kepemilikan saham



dalam upaya meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan



*How to Cite: Bobi, Y., Relita, D.T., Suriyanti, Y., Astikawati, Y. 2024. Pengaruh Good Corporate Governance dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 9 (1) DOI : 10.31932/jpe.v9i1.3388*

## PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di negara ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar operasional *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan secara adil, wajar, dan mematuhi seluruh peraturan pemerintah yang berlaku. Besaran pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu rata-rata sebesar 14,15% dari 100 sampel perusahaan, menurut penelitian Fatmawatie (2017). Organisasi ini menjalankan tanggung jawab sosial dalam upaya melestarikan eksistensinya sekaligus memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan. CSR bertujuan untuk memastikan bahwa kesuksesan finansial jangka panjang suatu bisnis sejalan dengan keadilan sosial.

Mengingat banyaknya tuntutan dunia usaha untuk memperhitungkan dampak operasi mereka, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan instrumen penting untuk berkomunikasi antara komunitas bisnis dan masyarakat umum (Sinaga, 2021). Said., *et al* (2019) menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat meningkatkan nilai, reputasi dan kinerja keuangan perusahaan. Kebutuhan untuk mengadopsi CSR semakin meningkat di era informasi dan teknologi karena tekanan globalisasi.

Oleh karena itu, pelaksanaan CSR sebenarnya selalu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan kemampuan perusahaan. Namun CSR masih dianggap tidak penting dan terutama dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat setempat. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang mempengaruhi CSR. Sejak krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi pada tahun 1997, gagasan ini semakin populer di Indonesia. Krisis ini diyakini disebabkan oleh dunia usaha yang lalai dalam menjalankan operasionalnya secara bertanggung jawab dan tidak mengindahkan hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya kegiatan KKN seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemerintah Indonesia menandatangani Memorandum Perjanjian (*Letter of Intent*) dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2019, sebagaimana dirinci oleh Prabudi dan Suana (2019). Surat ini mendorong penerapan GCG dengan mendorong perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KNKCG), yang kemudian berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KNKG). Tanggung jawab utama lembaga ini termasuk mengembangkan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG dan memulai serta mengawasi kemajuan tata kelola perusahaan di Indonesia. Landasan tata kelola perusahaan di Indonesia adalah



kesetaraan, keadilan, independensi, akuntabilitas dan transparansi. Menurut Habbash (2018), GCG telah berkembang menjadi alat yang memperhitungkan hubungan antara bisnis dengan lingkungan dan masyarakat, yang sebelumnya tidak dianggap signifikan. Hasilnya, pengungkapan CSR perusahaan kini lebih banyak.

Habbash (2018) menguji pengaruh komite audit, komisaris independen, dual fungsi CEO, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility*. Mereka menemukan bahwa meskipun komite audit, dewan independen, peran ganda CEO, serta kepemilikan pemerintah dan manajerial semuanya merugikan, namun hal-hal tersebut memiliki dampak yang menguntungkan jika menyangkut kepemilikan pemerintah dan manajerial. Habbash (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 dan 2017. Karena bisnis pertambangan dianggap sebagai sektor korporasi yang paling tepat untuk tujuan studi pengungkapan tanggung jawab sosial, maka penulis memilih sampel perusahaan-perusahaan tersebut. Aktivitas perusahaan pertambangan, seperti pembukaan lahan dan pembuangan limbah ke sungai, termasuk arsenik dan merkuri, pengerukan sungai dan penggunaan bahan peledak, berdampak buruk terhadap ekosistem. Karena faktor-faktor ini, menurut penulis, bisnis harus memenuhi tanggung jawab sosialnya untuk melindungi lingkungan.

Merujuk penelitian Habbash (2018) yang mengevaluasi dampak dari beberapa faktor korporat terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR), termasuk komite

audit, komisaris independen, peran ganda CEO, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun beberapa faktor seperti komite audit, dewan independen, dan peran ganda CEO cenderung memiliki dampak negatif, namun kepemilikan pemerintah dan manajerial dapat memberikan kontribusi positif terhadap CSR. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 dan 2017. Dipilihnya sektor pertambangan sebagai fokus studi karena aktivitasnya, seperti pembukaan lahan dan pembuangan limbah ke sungai (termasuk arsenik dan merkuri), serta pengerukan sungai dan penggunaan bahan peledak, seringkali memiliki dampak negatif pada ekosistem. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka, khususnya dalam melindungi lingkungan.

Penelitian Rustiarini (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, oleh karena itu variabel independen kepemilikan asing dan publik dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan riset Siregar & Priantinah (2017), laporan CSR tahunan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan saham publik. Penelitian Hitipeuw & Kuntari (2020), menunjukkan bahwa perusahaan publik mempunyai dampak menguntungkan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Bisnis yang memiliki lebih banyak saham yang tersedia untuk publik menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang besar terhadapnya. Korporasi akan melakukan



segala daya untuk menjaga kepercayaan ini tetap utuh dengan mengungkapkan seluruh operasi bisnisnya. Kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu pengungkapan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang mengadopsi model kausalitas untuk menguji hubungan antara variabel yang dapat memengaruhi atau tidak memengaruhi variabel lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 dan 2022. Data diperoleh melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.icamel.id](http://www.icamel.id), Perpustakaan Elektronik Pasar Modal Indonesia (ICAMEL). Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2023, dengan periode penelitian berlangsung dari September 2023 hingga Januari 2024. Seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2022 diikutsertakan dalam penelitian ini, yang berjumlah sebanyak 82 perusahaan. Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel, di mana kriteria pemilihan termasuk keberadaan informasi tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan saham. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilihlah 76 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data yang diperoleh dari laporan tahunan emiten tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Linear Sederhana dan Analisis Regresi Berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Uji normalitas** dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-*

*Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0.673, yang lebih besar dari 0.05 artinya data penelitian memiliki distribusi normal.

**Tabel 1. Hasil uji Normalitas**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
<i>Unstandardized Residual</i>		
<i>N</i>		75
<i>Normal</i>	<i>Mean</i>	.0000000
<i>Parameters<sup>a</sup></i>	<i>Std.</i>	.10982417
<i>b</i>	<i>Deviation</i>	
<i>Most</i>	<i>Absolute</i>	.078
<i>Extreme</i>	<i>Positive</i>	.065
<i>Differences</i>	<i>Negative</i>	-.076
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.423
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.673

Sumber: Data Olahan, (2023)

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel penelitian dalam studi ini memenuhi asumsi distribusi normal. Hal ini memungkinkan penggunaan metode statistik yang memerlukan data yang berdistribusi normal untuk analisis lebih lanjut.

**Uji Multikolinearitas.** Hasil uji multikolinearitas variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai toleransi (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk setiap variabel independen berada dalam rentang yang dapat diterima. Ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 ( <i>Constant</i> )		
KA	.927	1.078
KKDI	.908	1.101
KKI	.738	1.355
KKA	.892	1.121
KKP	.823	1.215

Sumber: Data Olahan, (2023)



Nilai tolerance untuk setiap variabel independen > 0.10, dan VIF < 10. Ini menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi. Jadi, model regresi ini bisa dipercaya untuk analisis lebih lanjut.

**Uji Heteroskedastisitas**, Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk semua variabel independen lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.603	1.513		5.025	.000
KA	-.556	.228	-.258	-2.432	.768
KKDI	-.346	.797	-.046	-.433	.400
KKI	.061	.128	.050	.477	.920
KKA	1.057	.636	.180	1.662	.467
KKP	-.446	.697	-.046	-.423	.590

Sumber: Data Olahan, 2023

Nilai signifikansi (Sig.) semua variabel dalam tabel tersebut melebihi 0.05, menunjukkan tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol tentang ketiadaan heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, model regresi penelitian dianggap bebas dari masalah tersebut dan valid untuk analisis lanjutan.

**Uji Autokorelasi.** Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-

Watson sebesar 2.235. Nilai Durbin-Watson yang berada antara 1.55 dan 2.46 menandakan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan dalam model regresi. Dalam uji Durbin-Watson, nilai yang dihasilkan dapat berada dalam rentang antara 0 dan 4. Sehingga dapat disimpulkan model regresi dianggap sudah sesuai untuk digunakan dalam analisis data.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

Model Regresi X1	ANOVA <sup>b</sup>				
	R <sup>2</sup>	t hitung	sig	Koefisien Regresi	constant
X1-Y	.125	3.249	.832	.018	.246
X2-Y	.001	.213	.832	.018	.368
X3-Y	.038	1.702	.093	.073	.336
X4-Y	.302	5.664	.000	.139	.323
X5-Y	.121	-3.055	.030	-.148	.421

Sumber: Data Olahan, 2023

**Pengaruh Komite Audit terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social**

**Responsibility**, Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai t hitung sebesar



3.249 dengan signifikansi sebesar .832. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ukuran komite audit dan tingkat pengungkapan CSR. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” dapat diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rouf (2021) dan Said *et al.* (2019), yang juga menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap derajat pengungkapan CSR. Menurut Said *et al.* (2019), komite audit memiliki tanggung jawab yang meliputi pemeriksaan departemen audit internal, rencana audit tahunan, laporan keuangan triwulanan dan tahunan, serta perhatian khusus terhadap perubahan kebijakan dan praktik akuntansi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, komite audit memegang peranan penting dalam mengawasi operasional perusahaan, termasuk pengungkapan dan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang hubungan antara komite audit dan pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dan efektivitas komite audit dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Penemuan ini juga dapat menjadi landasan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pentingnya memperkuat peran dan fungsi komite audit dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut teori *agency*, agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, dan perilaku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan (Surya

dan Yustivandana, 2019). Penjelasan di atas menunjukkan bagaimana komite audit dapat meminimalkan masalah keagenan dan memberikan tekanan kepada direksi untuk bertindak rasional demi kepentingan terbaik pemegang saham. Kehadiran komite audit juga dapat menunjukkan kualitas pengawasan yang lebih baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi manajemen dalam hal memberikan lebih banyak informasi kepada pengguna laporan keuangan. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Habbash (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

**Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*,** Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan nilai *t* hitung sebesar 0.213 dengan tingkat signifikansi (*sig*) sebesar 0.832. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan komposisi dewan komisaris independen. Dengan demikian, hipotesis yang mengasumsikan hubungan positif antara keduanya ditolak. Ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR oleh perusahaan dalam konteks penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa faktor komposisi dewan komisaris independen mungkin bukanlah faktor yang signifikan dalam menentukan sejauh mana perusahaan melakukan pengungkapan CSR dalam konteks yang diteliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2022) yang menyatakan bahwa komposisi dewan



komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Habbash (2018) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan hal ini kemungkinan disebabkan karena dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan dewan komisaris independen tidak dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial (Susanti dan Riharjo, 2018). Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR seperti halnya dikarenakan batas minimum dewan komisaris independen hanya sebesar 30%, sehingga pengaruh yang diberikan oleh dewan komisaris independen belum cukup tinggi untuk mempengaruhi keputusan dewan komisaris.

**Pengaruh Komposisi Kepemilikan Institusi terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility***, hasil dari analisis regresi sederhana menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,702 dengan tingkat signifikansi (sig) sebesar 0,093 menunjukkan bahwa komposisi kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. Tanggung jawab, berdasarkan hasil analisis regresi sederhana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata antara komposisi kepemilikan institusional

dengan derajat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, hipotesis ketiga—yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara komposisi kepemilikan institusional dan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)—tidak terbukti. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Asyirin et al., 2018), yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, mungkin karena kurangnya pengawasan atau monitoring dari investor institusional terhadap manajemen perusahaan. Ini berbeda dengan penelitian Rustiarini (2020), yang menekankan bahwa kepemilikan institusional umumnya berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang lebih transparan. Sehingga, meskipun ada perbedaan hasil, kepemilikan institusional masih memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan volume pengungkapan sukarela.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1 menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, kurangnya standar pengungkapan yang jelas menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga menghambat pemahaman yang kohesif tentang CSR sehingga menyebabkan perusahaan hanya menjalankan program tanggung jawab sosialnya hanya sekedar untuk menghindari sanksi terhadap perusahaan.. Institusi lebih cenderung ingin memaksimalkan harga saham, maka



kepemilikan institusional tidak banyak berpengaruh terhadap derajat pengungkapan CSR. Terdapat tanda-tanda bahwa pemilik institusional memiliki preferensi yang lebih kuat terhadap harga saham, yang berarti mereka hanya memenuhi kewajibannya dengan cara yang akan menaikkan harga saham daripada memenuhi tanggung jawab penuhnya sebagai pemegang saham. Di Indonesia, investor sering kali memprioritaskan keuntungan jangka pendek dan mengabaikan keberlanjutan jangka panjang. Teori keagenan yang menyatakan harus ada kesepakatan antara pemegang saham dan manajer tidak diikuti dengan tindakan. Ketika perusahaan tidak mampu memenuhi harapan pemegang saham atau tidak transparan dalam praktik CSR, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan mengurangi minat investor untuk berkontribusi dalam perusahaan tersebut

**Pengaruh komposisi kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.** Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan asing dan jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung sebesar 5.664 dengan signifikansi sebesar 0,000. Dari temuan ini adalah bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung lebih aktif dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke, yang juga menemukan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh komposisi kepemilikan asing. Haniffa dan Cooke (2022) menyatakan bahwa perusahaan dengan pemilik asing sering kali merasa perlu untuk meningkatkan

transparansi terkait CSR sebagai strategi untuk memenangkan kepercayaan investor dan mempertahankan aliran pendanaan. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa tekanan dari pemegang saham asing dapat menjadi faktor penting dalam mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan asing dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam hal pengungkapan CSR, dan bahwa perusahaan cenderung merespons tekanan ini dengan meningkatkan tingkat transparansi mereka dalam hal tanggung jawab sosial.

Bisnis milik asing biasanya menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Ada beberapa penyebab hal ini. Pertama, gagasan praktik dan pengungkapan CSR lebih familiar bagi bisnis internasional khususnya di Eropa dan Amerika. Kedua, perusahaan induk asing memberikan pelatihan akuntansi yang unggul kepada perusahaan asing. Ketiga, bisnis mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efektif untuk memenuhi permintaan perusahaan induk dan internal. Keempat, ada kemungkinan klien, pemasok, dan masyarakat umum lebih menginginkan bisnis di luar negeri. Penelitian ini bertentangan dengan temuan Machmud dan Djakman (Febrina, 2021). Mereka menyatakan bahwa kemungkinan konsolidasi kepemilikan asing dengan perusahaan induk di negara asal pemilik asing menjadi alasan kepemilikan asing di perusahaan Indonesia tidak meningkat. Mereka menggunakan Indeks GRI ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)) sebagai ukuran pengungkapan CSR. Karena persentase kepemilikannya yang kecil, perusahaan-perusahaan tersebut merasa tidak perlu



terlalu sering mengungkapkan CSR kepada publik.

**Pengaruh komposisi kepemilikan publik terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility,** Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan negatif antara komposisi kepemilikan publik dan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini tercermin dari nilai t hitung sebesar -3.055 dengan signifikansi sebesar 0,030. Dari temuan ini terungkap ada kecenderungan bahwa perusahaan dengan komposisi kepemilikan publik yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan CSR yang lebih rendah. Salah satu alasan yang mungkin adalah bahwa investor dalam kepemilikan publik cenderung lebih memperhatikan fluktuasi harga saham daripada tanggung jawab sosial perusahaan. Ini menunjukkan bahwa investor dalam kepemilikan publik mungkin kurang peduli atau kurang memperhatikan tingkat pengungkapan CSR saat membuat keputusan investasi. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang CSR dan prioritas utama investor untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi mereka. Dengan demikian, temuan ini menyoroti pentingnya kesadaran publik dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam menarik minat investor dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengungkapan CSR. Ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks kepemilikan publik, fluktuasi harga saham mungkin lebih dominan dalam pengambilan keputusan investasi daripada

pertimbangan CSR, baik dalam tingkat pengungkapan tinggi maupun rendah.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sandityas & Trisnawati, (2019) yang menemukan bahwa tingkat pengungkapan sosial yang lebih tinggi diharapkan dari perusahaan dengan rasio kepemilikan publik yang tinggi. Hal ini terkait dengan tekanan yang diberikan pemegang saham terhadap dunia usaha agar lebih memikirkan kewajibannya. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur dan Priantinah (2019) yang tidak menemukan hubungan antara kepemilikan saham publik dengan pengungkapan CSR. Menurut Rahma dan Indah (Nur dan Priantinah, 2019) bahwasanya kepemilikan publik atas bisnis di Indonesia biasanya tidak mempertimbangkan isu sosial dan lingkungan sebagai isu krusial yang perlu diungkapkan sepenuhnya dalam laporan tahunan.

**Pengaruh ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan institusi, komposisi kepemilikan asing, dan komposisi kepemilikan publik terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility,** Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen (ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan institusional, komposisi kepemilikan asing, dan komposisi kepemilikan publik) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR, sebagaimana dibuktikan oleh nilai signifikansi F yang rendah (0.000) dan nilai  $R^2$  yang relatif tinggi (0.513).

**Tabel 4. Pengaruh Simultan Variabel Independen Variabel Dependen**

Varibel	Sig F	R2	F hitung	F tabel
KA	.000	.513	16.802	2.235
KKDI	.000	.513	16.802	2.235
KKI	.000	.513	16.802	2.235
KKA	.000	.513	16.802	2.235
KKP	.000	.513	16.802	2.235

Sumber: Data Olahan, 2023

Temuan ini menandakan bahwa beberapa faktor seperti efisiensi komite audit, independensi dewan komisaris, partisipasi aktif pemegang saham institusional, kebutuhan untuk mendapatkan legitimasi dari pemegang saham asing, serta kewajiban perusahaan untuk memberikan laporan ke publik, secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan kegiatan CSR mereka. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan, cenderung untuk lebih transparan dalam mengungkapkan kegiatan CSR mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan CSR dalam konteks lingkungan bisnis yang kompleks dan terdiversifikasi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya mendorong praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta memperkuat kesadaran akan tanggung

jawab sosial perusahaan di kalangan pemangku kepentingan yang beragam.

Pentingnya aspek-aspek tersebut dalam meningkatkan pengungkapan CSR juga diperkuat oleh temuan Habbash (2018), yang menekankan peran penting komite audit dalam memantau tindakan manajerial terutama terkait tanggung jawab sosial bisnis. Selain itu, pembentukan dewan komisaris independen juga dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan mencegah kecurangan dalam bisnis. Partisipasi aktif pemegang saham institusional juga diakui sebagai faktor yang signifikan dalam meningkatkan pengendalian manajerial dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, sebagaimana yang disoroti oleh Murwaningsari (2019). Demikian pula, pentingnya pemegang saham asing dalam mendapatkan legitimasi dari lingkungan sekitarnya menunjukkan betapa kehadiran mereka dapat meminimalkan biaya keagenan dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, pentingnya keterbukaan dan transparansi perusahaan kepada pemegang saham publik juga ditegaskan oleh Siregar & Priantinah, (2017) yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya praktik tata kelola perusahaan yang baik dan kesadaran akan tanggung



jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan CSR. Implikasinya adalah pentingnya mendorong praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik serta memperkuat kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan pemangku kepentingan yang beragam.

## PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyoroti peran penting komite audit dalam mengawasi operasional perusahaan. Namun, tidak ada hubungan signifikan antara jumlah anggota dewan komisaris independen dan tingkat pengungkapan CSR, menunjukkan bahwa faktor komposisi dewan komisaris independen mungkin tidak begitu relevan dalam hal pengungkapan CSR. Selain itu, tidak ada hubungan yang signifikan antara komposisi kepemilikan institusional dan tingkat pengungkapan CSR, menandakan bahwa pemegang saham institusional mungkin lebih fokus pada keuntungan daripada tanggung jawab sosial. Namun, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan asing dan pengungkapan tanggung jawab sosial, menunjukkan bahwa tekanan dari pemegang saham asing dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam CSR. Di sisi lain, komposisi kepemilikan publik memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pengungkapan CSR, menandakan bahwa investor publik cenderung kurang memperhatikan tanggung jawab sosial saat membuat keputusan investasi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya praktik tata kelola perusahaan yang baik, kesadaran

akan tanggung jawab sosial, serta peran pemegang saham asing dalam mendorong transparansi perusahaan terkait CSR. Lebih lanjut, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih representatif dari berbagai industri dan menggunakan rentang waktu yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyirin, R. N., Paminto, A., & Nadir, M. (2018). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Manufaktur (Sektor Industri Barang Konsumsi) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman (JIMM)*, 3(4).
- Fatmawatie, N. (2017). *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. STAIN Kediri Press.
- Febrina, D. (2021). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di BEI Tahun 2010-2014)*. *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia*.
- GRI. (2020). *Global Reporting Initiatives*. Diakses pada 25 Januari 2016, dari: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org).
- Habbash, M. (2018). *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure : Evidence from Saudi Arabia*. *Journal of Social Responsibility*, 10(9), 267–283.



- Haniffa, R. M., dan Cooke, T. E. (2022). *The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430. <https://doi.org/10.1108/17471110910967559>
- Hitipeuw, S. D., & Kuntari, Y. (2020). *Pengaruh kepemilikan saham publik, profitabilitas, dan media terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan*. *Management and Accounting Expose*, 3(1), 40-51.
- Murwaningsari, E. (2019). *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum*. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 1(1), 1-45.
- Nur, M, dan Priantinah, D. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia)*. *Journal Nominal*, 1(1), 22-34.
- Rouf, M. D. (2021). *An Empirical Investigation into Corporate Voluntary Disclosure of Management's Responsibilities in the Bangladeshi Listed Companies*. *ASA University Review*, 5(1), 261-274.
- Rustiarini, W. N. (2020). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 1-24.
- Said, R., Zainuddin, Y. H., & Haron, H. (2009). *The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance Characteristics In Malaysian Public Listed Companies*. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212-226.
- Sandityas, Z. A., & Trisnawati, R. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)*. Seminar Nasional dan The 6th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2019.
- Sinaga, A. M. (2021). *Pengaruh Elemen Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Sektor Perbankan di Indonesia*. *Skripsi S1 Universitas Diponegoro*.
- Siregar, R. M. M., & Priantinah, D. (2017). *Pengaruh good corporate governance dan kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan corporate social responsibility*. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(6).
- Surya, I., dan Yustivandana, I. (2019). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Susanti, S., dan Riharjo, I. B. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Cosmetics and Household*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(1), 152-167.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

